



BARANG MILIK NEGARA

Modul Pembelajaran SMP Terbuka PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kelas
VIII



Modul 3

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama



Modul Pembelajaran SMP Terbuka
**PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN**
Kelas VIII

Modul 3
**KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama
2021

© Hak cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Modul Pembelajaran SMP Terbuka

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Modul 3:
Kedudukan dan Fungsi
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Kelas VIII

Pengarah:

Mulyatsyah

Penanggung Jawab:

Eko Susanto

Kontributor:

Imam Pranata, Harnowo Susanto,
Ninik Purwaning Setyorini,
Maulani Mega Hapsari

Penulis:

Erni Setianingrum

Reviewer:

Rona Norhana Dewi

Editor:

Didi Teguh Chandra, Amsor,
Agus Fany Chandra Wijaya, Hutnal Basori,
Sukma Indira, Kader Revolusi,
Andi Andangatmadja, Tri Mulya Purwiyanti,
Tim Layanan Khusus

Layout Design:

Ghina Fitriana,
Belaian Pelangi Baradiva,
Yan Mahdi Muhammad

Diterbitkan oleh:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama



www.ditsmp.kemdikbud.go.id



[ditsmp.kemdikbud](https://www.instagram.com/ditsmp.kemdikbud)



[Direktorat SMP Kemdikbud](https://www.facebook.com/DirektoratSMPKemdikbud)



[Direktorat SMP](https://www.youtube.com/DirektoratSMP)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah berhasil menyusun Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII dengan baik. Tujuan disusunnya Modul Pembelajaran ini adalah sebagai salah satu bentuk layanan penyediaan bahan belajar peserta didik SMP Terbuka agar proses pembelajarannya lebih terarah, terencana, variatif, dan bermakna. Dengan demikian, tujuan memberikan layanan SMP Terbuka yang bermutu bagi peserta didik SMP Terbuka dapat terwujud.

Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII yang telah disusun ini disajikan dalam beberapa kegiatan belajar untuk setiap modulnya dan beberapa modul untuk setiap mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan adanya modul pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII ini, kami berharap, peserta didik dapat memperoleh kemudahan dan kebermaknaan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran mandiri dan terstruktur. Selain itu, Guru Pamong dan Guru Bina pun dapat merancang, mengarahkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan lebih baik sebagai bagian dari proses peningkatan mutu layanan di SMP Terbuka. Dengan layanan SMP Terbuka yang bermutu, peserta didik akan merasakan manfaatnya dan termotivasi untuk mencapai cita-citanya menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan diterbitkannya Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII ini diharapkan kualitas layanan pembelajaran di SMP Terbuka menjadi lebih baik. Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap dapat memperoleh kritik, saran, rekomendasi, evaluasi, dan kontribusi nyata dari berbagai pihak untuk kesempurnaan modul ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VIII ini. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka dengan segala kerendahan hati akan kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2021

Direktur
Sekolah Menengah Pertama,



Drs. Mulyatsyah, M.M.
NIP. 196407141993041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
I. Pendahuluan	1
A. Deskripsi Singkat	1
B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.....	2
C. Petunjuk Belajar	2
D. Peran Orang Tua dan Guru	3
II. Kegiatan Belajar 1: Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	5
A. Indikator Pembelajaran	5
B. Aktivitas Pembelajaran	5
C. Tugas	10
D. Rangkuman	11
E. Tes Formatif	12
III. Kegiatan Belajar 2: Perundang-Undangan dalam sistem hukum nasional	15
A. Indikator Pembelajaran	15
B. Aktivitas Pembelajaran	15
C. Tugas	21
D. Rangkuman	22
E. Tes Formatif	23
TES AKHIR MODUL.....	27
LAMPIRAN.....	31
A. Glosarium	31
B. Kunci Jawaban Tugas	32
C. Kunci Jawaban Tes Formatif.....	33
D. Kunci Jawaban Tes Akhir Modul	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gedung DPR/MPR	5
Gambar 3.2 Anggota DPR/MPR sedang bersidang	6
Gambar 3.3 Diskusi.....	15
Gambar 3.4 Tata tertib sekolah.....	16
Gambar 3.5 Belajar	17
Gambar 3.6 Beribadah	17
Gambar 3.7 Perlindungan hukum	17
Gambar 3.8 Pemilihan Umum.....	17
Gambar 3.9 TNI dan rakyat	18
Gambar 3.10 TNI dan rakyat	18



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	2
Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan	5
Tabel 3.3 Daftar Isian	6





I PENDAHULUAN



KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. DESKRIPSI SINGKAT

Salam sehat dan bahagia untuk Ananda semua. Semoga Ananda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat Ananda sudah menyelesaikan modul 2 dan sekarang sedang mempelajari modul 3. Semoga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan selalu semangat.

Kemandirian merupakan hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran di SMP Terbuka. Tentu Ananda sudah lebih memahami bahwa belajar di SMP terbuka berbeda dengan SMP Reguler. Modul ini adalah sebagai panduan Ananda dalam belajar. Meskipun demikian buku teks tetap Ananda pergunakan sebagai buku utama.

Pada modul 2, Ananda sudah belajar tentang kedudukan dan makna Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Ananda mempelajari alinea-alinea yang terdapat dalam pembukaan. Sedangkan pada modul 3 Ananda akan belajar kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan Ananda dapat mengetahui secara lebih jelas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika sudah mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ananda dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baiklah, supaya lebih mengerti tentang materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mari kita ikuti aktivitas pembelajaran. Selamat belajar dan tetap semangat. Ingat Ananda adalah orang-orang yang hebat dan keren. Sukses untuk Ananda semua.

Berdoalah sebelum belajar! Selamat belajar dan tetap semangat!
Tetap jaga protokol kesehatan!

B. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Tabel 3.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti	Kompetensi Inti
<ol style="list-style-type: none">1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	<ol style="list-style-type: none">4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi Dasar	Kompetensi Dasar
<ol style="list-style-type: none">1.3 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa2.3 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19453.3 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional	<ol style="list-style-type: none">4.3 menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari

C. PETUNJUK BELAJAR

Sebelum Anda menggunakan Modul 3 ini terlebih dahulu Anda baca petunjuk mempelajari modul berikut ini:

1. Pelajarilah modul ini dengan baik. Mulailah mempelajari materi pelajaran yang ada dalam Modul 3 di setiap kegiatan pembelajaran hingga Anda dapat menguasainya dengan baik;
2. Lengkapilah setiap bagian aktivitas dan tugas yang terdapat dalam modul ini dengan semangat dan gembira. Jika mengalami kesulitan dalam melakukannya, catatlah kesulitan tersebut pada buku catatan Anda untuk dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung;

3. Lengkapi dan pahamiilah setiap bagian dalam rangkuman sebagai bagian dari tahapan penguasaan materi modul ini;
4. Kerjakan bagian Tes Formatif pada setiap bagian Kegiatan Belajar sebagai indikator penguasaan materi dan refleksi proses belajar Anda pada setiap kegiatan belajar. Ikuti petunjuk pengerjaan dan evaluasi hasil pengerjaannya dengan seksama;
5. Jika Anda telah menguasai seluruh bagian kompetensi pada setiap kegiatan belajar, lanjutkan dengan mengerjakan Tes Akhir Modul secara sendiri untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak/Ibu Guru;
6. Gunakan Daftar Pustaka dan Glosarium yang disiapkan dalam modul ini untuk membantu mempermudah proses belajar Anda.



Teruntuk Bapak/Ibu Orang Tua peserta didik, berkenan Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menampung serta membantu memecahkan permasalahan belajar yang dialami oleh Anda peserta didik. Jika permasalahan belajar tersebut belum dapat diselesaikan, arahkanlah Anda peserta didik untuk mencatatkannya dalam buku catatan mereka untuk didiskusikan bersama teman maupun Bapak/Ibu Guru mereka saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

Teruntuk Bapak/Ibu Guru, modul ini disusun dengan orientasi aktivitas peserta didik dan setiap modul dirancang untuk dapat mencakup satu atau lebih pasangan kompetensi- kompetensi dasar yang terdapat pada kompetensi inti 3 (pengetahuan) dan kompetensi inti 4 (keterampilan). Setiap peserta didik diarahkan untuk dapat mempelajari modul ini secara mandiri, namun demikian mereka juga diharapkan dapat menuliskan setiap permasalahan pembelajaran yang ditemuinya saat mempelajari modul ini dalam buku catatan mereka. Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Bapak/Ibu Guru dapat membahasnya dalam jadwal kegiatan pembelajaran yang telah dirancang sehingga Anda peserta didik dapat memahami kompetensi-kompetensi yang disiapkan dengan tuntas.

II

KEGIATAN BELAJAR 1



NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Indikator Pembelajaran

1. Menunjukkan sikap beriman dan bertaqwa dalam pembelajaran kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam pembelajaran kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Menunjukkan keterampilan mengamati tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Menunjukkan keterampilan menanya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

B. Aktivitas Pembelajaran



Apa Kabar Ananda semuanya? Salam sehat dan bahagia untuk Ananda semua. Semoga Ananda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat Ananda sudah menyelesaikan pembelajaran modul 2, sekarang kita berjumpa pada pembelajaran modul 3.

Belajar mandiri adalah belajar aktif yang Ananda lakukan dengan beraktivitas melalui modul ini. Belajar aktif dibutuhkan dorongan niat atau motivasi untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan pada bagian awal modul. Aktivitas pembelajaran modul ini berpusat pada Ananda bukan kepada guru atau bahan ajar, sehingga Ananda diharapkan aktif dan bertanggung jawab dalam mencapai ketuntasan kompetensi sesuai kecepatan belajar Ananda.

Modul ini juga dapat digunakan oleh orangtua untuk melibatkan diri dalam pendampingan, motivator untuk membiasakan Ananda beraktivitas belajar mandiri dan bertanggung jawab. Orang tua juga dapat menyediakan diri untuk berdiskusi dalam pembelajaran mandiri apabila dibutuhkan sehingga akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Dengan modul ini diharapkan Ananda dapat beraktivitas belajar secara maksimal dengan memanfaatkan sumber belajar yang lain, mengembangkan literasi, dan potensi lingkungan sekitar. Tentunya juga memperhatikan nilai-nilai karakter yang ada.

Pada modul 3, Ananda akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diharapkan setelah selesai modul ini, Ananda akan lebih memahami tentang kedudukan dan fungsi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baiklah Ananda semuanya, mari kita mulai pembelajaran pada modul 3. Tetap semangat dan jadilah anak Indonesia yang hebat dan berbudi pekerti luhur. Salam sukses.



Aktivitas 1

Sebelum mempelajari materi lebih lanjut, silahkan Ananda mengamati 2 gambar di bawah ini.

Literasi dengan mengamati gambar!

Setelah Ananda mengamati gambar, maka buatlah pertanyaan berkaitan dengan gambar tersebut. Selesai Ananda membuat pertanyaan, diskusikan dengan teman atau orang tua jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Ananda bisa juga melihat sumber belajar lain seperti buku teks, buku penunjang, dan internet.



Gambar 3.1 Gedung DPR/MPR
Sumber: medcom.id



Daftar pe

Gambar 3.2 Anggota DPR/MPR sedang sidang
Sumber: liputan6.com

Gambar	Pertanyaan	Jawaban
1
2

Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara sangatlah penting. Undang- Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia.

Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaannya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaannya, dan lain sebagainya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Hal ini berdampak bahwa setiap peraturan di bawah Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah peraturan yang berlaku di bawahnya sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah mengkaji tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mari kita pahami apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Untuk lebih mengetahui dengan lebih jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, silahkan Ananda isi tabel di bawah ini!

Tabel 3.3. Daftar isian

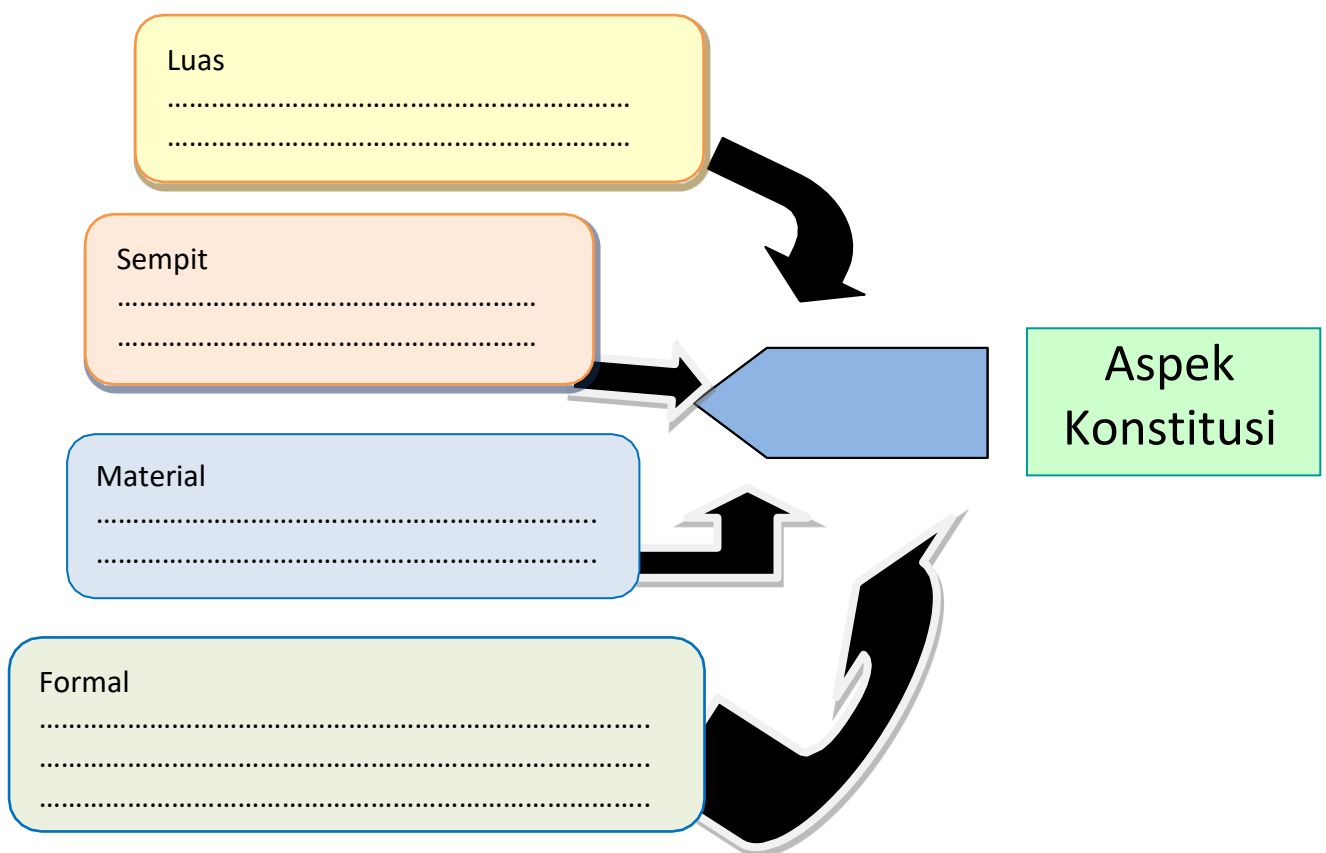
<p>Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada saat ini !</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--



Aktivitas 2

Undang-Undang Dasar sering disamakan dengan konstitusi. Kata konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Namun pada masa itu tidak secara tertulis. Konstitusi mencakup segala hal terkait kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Secara harfiah konstitusi jika diterjemahkan adalah undang-undang dasar. Dalam politik kenegaraan, konstitusi dimaknai dalam empat aspek.

Isilah titik-titik dalam tabel, Ananda bisa mencari dari berbagai sumber belajar. Sehingga Ananda akan lebih memahami tentang aspek konstitusi.



Dalam hierarki perundang-undangan, konstitusi menduduki posisi teratas. Kedudukan konstitusi bagi sebuah negara :

- a. Konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang aspek-aspek mendasar dalam kehidupan suatu negara seperti pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak dasar rakyat.
- b. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pasti isilah titik-titik dalam tabel, Ananda bisa mencari dari berbagai sumber belajar. Sehingga Ananda akan lebih memahami tentang aspek konstitusi.

Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbeda dengan yang dimiliki oleh negara lain. Latar belakang pembentukan undang-undang dasar disebabkan oleh beberapa hal, seperti faktor sejarah, cara memperoleh kemerdekaan, dan situasi menjelang kemerdekaan.

Sebagai hukum dasar yang tertinggi, tentu masyarakat harus menaati dan patuh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan akan menyebabkan kehidupan menjadi tertib dan teratur. Kepatuhan menjadi penting, karena cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan lebih mudah tercapai.

Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- a) Tertulis
- b) Singkat dan supel
- c) Memuat norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan
- d) Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi

Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- a) Alat Kontrol
- b) Pengatur
- c) Penentu

C. Tugas



Setelah membaca uraian materi, untuk lebih memperkuat pemahaman Ananda silahkan kerjakan tugas yang tersedia. Semoga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan.

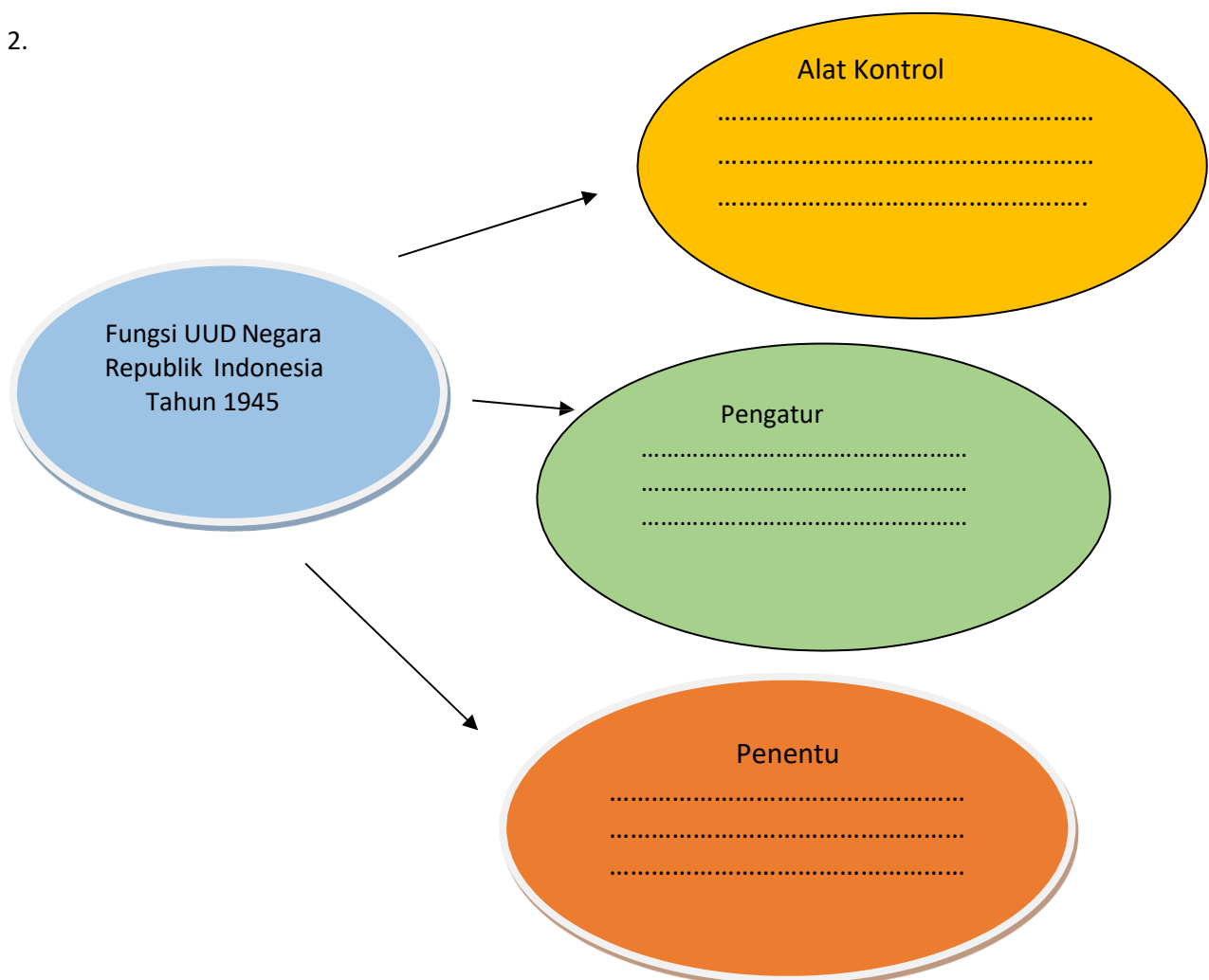
Isilah titik-titik pada soal ini dengan benar!

1.

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

.....
.....
.....

2.





Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini!
Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman dengan melengkapi kalimat-kalimat berikut ini!

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah.....
Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan
tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
..... dan merupakan hukum dasar yang.....
Hal ini berdampak bahwa setiap peraturan di bawah Undang-undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus.....
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!

E.

TES FORMATIF



Kerjakan soal di bawah ini dengan memilih jawaban yang paling tepat!

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumen hukum yang di dalamnya mengandung aspek non hukum seperti pandangan hidup, cita-cita moral, keyakinan religius, dan paham politik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dalam arti
 - A. Luas
 - B. Statis
 - C. Sempit
 - D. Dinamis
2. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memainkan berbagai fungsi salah satunya sebagai alat kontrol. Pelaksanaan fungsi konstitusi sebagai alat kontrol ditunjukkan oleh pernyataan
 - A. Sebuah ketentuan undang-undang harus direvisi karena bertentangan dengan undang-undang dasar
 - B. Lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan dalam undang-undang dasar
 - C. Hak beragama dijamin dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - D. Undang-undang dasar memuat prosedur perubahan atau amandemen konstitusi
3. Pada konstitusi Indonesia terdapat pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ketiga lembaga tersebut tidak saling membawahi, tetapi melakukan kerja sama dan saling mengawasi. Pembagian kekuasaan tersebut sesuai pengertian konstitusi secara sempit, yaitu
 - A. Konstitusi tidak hanya meliputi aspek hukum, tetapi juga non hukum
 - B. Konstitusi mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara
 - C. Konstitusi merupakan bentuk pengaturan tentang berbagai aspek mendasar dalam sebuah negara
 - D. Konstitusi berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara
4. Inggris memiliki konstitusi yang tersebar dalam berbagai konvensi dan perjanjian. Meskipun demikian masyarakat Inggris memiliki kesadaran untuk mematuhi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan konstitusi tersebut bersifat
 - A. Rigid
 - B. Tertulis
 - C. Fleksibel
 - D. Tidak tertulis

5. Konstitusi dalam arti positif mengandung pengertian sebagai
- A. Keputusan penguasa yang memberikan hak kebebasan kepada warga negara
 - B. Hukum dasar tertulis sehingga konstitusi dikatakan sebagai hukum positif
 - C. Suatu tatanan nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
 - D. Keputusan masyarakat mengenai sifat dan bentuk kesatuan politik

Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 ini, silahkan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 3. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai} : \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

1. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (*disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan*), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catatkan pada buku catatan Ananda bagian mana saja yang masih belum Ananda pahami untuk kemudian Ananda dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakan langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. Jika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75%, Ananda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya atau mengikuti Tes Akhir Modul.
3. Setelah Ananda lulus dalam mengikuti Tes Akhir Modul, Ananda dapat mempelajari materi pembelajaran yang terdapat dalam modul berikutnya.
4. Lakukan langkah **1** sampai dengan **3** di atas merupakan persyaratan Ananda untuk dapat mempelajari modul berikutnya.



III

KEGIATAN BELAJAR 2

PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A. Indikator Pembelajaran

1. Menunjukkan sikap beriman dan bertaqwa dalam pembelajaran Kedudukan dan fungsi Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional
2. Menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam pembelajaran Kedudukan dan fungsi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional
3. Mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
4. Mendeskripsikan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional
5. Menyusun hasil laporan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional
6. Menyajikan laporan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional

B. Aktivitas Pembelajaran



Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu Ananda berdoa semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui Ananda tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah selalu kesehatan, karena jika sehat maka Ananda bisa melakukan segala aktivitas dengan baik.

Ananda yang hebat, pada kegiatan belajar 2 kita akan mempelajari tentang perundang undangan dalam sistem hukum nasional. Sama seperti kegiatan belajar 1, ketelitian dan kecermatan akan berpengaruh besar dalam keberhasilan Ananda melaksanakan pembelajaran.

Silahkan Ananda baca materi yang ada lalu kerjakan dengan semangat aktivitas, tugas, dan tes formatif yang diberikan. Selamat belajar dan sukses untuk Ananda semuanya, generasi hebat Indonesia. Ayo kita mulai beraktivitas.



Aktivitas 2

Sebelum mempelajari materi lebih lanjut, silahkan Ananda mengamati gambar di bawah ini.



Gambar 3.3 diskusi
Sumber. Kompasiana.com

Dalam kehidupan, manusia tidak bisa berpikir sendiri dalam mengatasi suatu permasalahan. Sehingga dibutuhkan pemikiran banyak orang dalam suatu rapat, yaitu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bernegara.

Berikan pendapat Ananda tentang gambar tersebut!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Selain melaksanakan rapat untuk menyelesaikan dan membahas suatu masalah, juga diperlukan tata tertib. Contohnya dalam lingkungan sekolah. Pasti Ananda pernah membaca tata tertib sekolah. Jam belajar dimulai dari pukul berapa dan berakhir sampai pukul berapa. Biasanya setiap sekolah mempunyai aturan sendiri. Semua peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan di sekolah. Tujuan dibuat peraturan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Peraturan dibuat tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan di sekolah dikenal dengan nama lain adalah tata tertib sekolah. Sedangkan peraturan di lingkungan berbangsa dan bernegara dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar.



TATA TERTIB PESERTA DIDIK




1. Jadwal masuk dan pulang pembelajaran:
Masuk : 06,30 WIB
Pulang : 13.30 WIB
1. Peserta didik yang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas sebelum ada izin tertulis dari guru piket.
2. Pada waktu pergantian Pelajaran, Peserta didik tidak diperkenankan keluar kelas tanpa seizin guru piket.
3. Karena sesuatu hal guru belum bisa hadir di kelas pada jam belajar, maka peserta didik tetap tenang belajar sendiri/kelompok.
4. Peserta didik yang meninggalkan kelas karena sakit atau sebab lain harus seizin guru yang mengajar atau guru piket.
5. Peserta didik yang sakit atau karena urusan lain, sehingga tidak bisa masuk sekolah, maka orangtua/ wali harus mengirim surat dan melampirkan surat keterangan dokter bila sakit.
6. Peserta didik yang tidak bisa masuk sekolah karena sesuatu hal, dan tidak dapat memberitahukan ke sekolah diharuskan membawa surat keterangan dari orangtua bila peserta didik tersebut masuk.
7. Peserta didik yang tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari berturut – turut tanpa keterangan orang tua akan di panggil dan membuat surat pernyataan pertama
8. Peserta didik yang tidak hadir lebih dari 9 (sembilan) hari dalam waktu satu (1) bulan tanpa alasan yang jelas, akan diberikan sanksi berupa skorsing dan membuat surat pernyataan ke 2 (dua).

Gambar 3.4 Tata Tertib sekolah
Sumber. Dokumen pribadi Erni

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara yang berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Manusia dan hukum merupakan komponen yang tidak terpisahkan. Manusia merupakan makhluk individu dan sosial yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan. Tidak jarang kepentingan mereka saling berbenturan sehingga terjadi kekacauan. Dalam menghadapi benturan kepentingan tersebut, maka hukum dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan sistem yang mengatur kehidupan. Yang menjamin hak dan terlaksananya kewajiban.

Norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang merupakan peraturan tertulis. Pembentukannya dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang masih berlaku di Indonesia disebut hukum positif Indonesia.

Isilah tabel di bawah ini!

No.	Hak Warga negara	Dasar hukum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	Manfaat adanya Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1	 <p>Gambar 3.5 belajar Sumber: Dokumen pribadi Erni</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2	 <p>Gambar 3.6 beribadah Sumber: Islami.co.id</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3	 <p>Gambar 3.7 Perlindungan hukum Sumber: Suduthukum.com</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
4	 <p>Gambar 3.8 Pemilihan Umum Sumber: hariansib.com</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



Aktivitas 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pembukaan dan pasal-pasal yang merupakan ketentuan pokok pelaksanaan pemerintahan negara. Oleh karena itu jika ingin mengetahui pelaksanaan ketatanegaraan suatu negara, dapat melihat undang-undang dasarnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisikan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme.

Melalui pasal-pasal dapat dilihat hubungan antar lembaga negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan hukum. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melaksanakan pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar 3.9. TNI dan rakyat
Sumber. Kompasiana.com



Gambar 3.10. TNI dan rakyat
Sumber dokumen pribadi Erni

Berikan pendapat Ananda melihat gambar TNI dan rakyat.

.....

.....

.....

.....

.....

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Undang-undang yang dibuat tentunya dengan tujuan menciptakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu ada hak dan kewajiban antara rakyat dan pemerintah. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka secara tidak langsung menunjukkan adanya tujuan negara. Tujuan negara Indonesia terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat memaksa dan mengikat. Artinya memaksa memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Dikatakan bersifat mengikat karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi yang tegas. Selain memaksa dan mengikat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi pokok membatasi kekuasaan pemerintah. Sehingga penyelenggara negara tidak bersikap sewenang-wenang. Selain itu hak-hak warga negara lebih terlindungi. Dengan demikian dapat dikatakan ada fungsi khusus dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk sikap yang bisa dilakukan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- a. Bersikap terbuka
Memahami keberadaan diri sebagai warga negara yang berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan penyelenggara negara seoptimal mungkin.
- b. Mampu mengatasi masalah
Bertanggung jawab menghadapi masalah dan mampu mengatasi masalah dengan memberikan solusi bijaksana. Tidak hanya sebagai penonton dan pengkritik yang menyalahkan orang lain.
- c. Menyadari adanya perbedaan
Bangsa Indonesia terdiri atas beragam agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk perpecahan. Perbedaan itu kekuatan bangsa Indonesia sebagai unsur-unsur pemersatu bangsa sehingga terjalin kerukunan.
- d. Memiliki harapan realistis
Setiap warga negara berhak mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya dari negara. Meskipun demikian hak yang warga negara minta hendaknya realistis karena negara mempunyai keterbatasan.
- e. Menghargai karya bangsa sendiri
Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri. Salah satu caranya dengan mengisi pembangunan dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- f. Mau menerima dan memberi umpan balik
Kesadaran untuk tunduk dan patuh dalam menghormati produk-produk konstitusi yang dihasilkan para penyelenggara negara.

C. Tugas



Ananda yang hebat dan keren, setelah belajar tentang perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, kerjakan tugas di bawah ini.

No.	Lingkungan	Contoh penerapannya
1	Keluarga
2	Sekolah
3	Masyarakat
4	Bangsa dan Negara

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!



Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini! Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman dengan melengkapi kalimat-kalimat berikut ini!

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat memaksa dan mengikat. Artinya memaksatanpa terkecuali. Dikatakan bersifat mengikat karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyaimembatasi kekuasaan pemerintah dan lembaga negara.

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!

E.

TES FORMATIF



Untuk mengetahui apakah Ananda telah menguasai materi pelajaran pada Modul 3 kegiatan belajar 2 ini, kerjakan soal tes yang disediakan. Tes ini harus dikerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban. Kerjakan dengan jujur dan tanggung jawab.

1. Lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamandemenkan adalah
 - A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - B. Dewan Perwakilan Rakyat
 - C. Dewan Perwakilan Daerah
 - D. Mahkamah Konstitusi
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi negara Republik . Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah ...
 - A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi satu-satunya aturan hukum di Indonesia
 - B. Semua peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - C. Ketentuan isi dasar negara harus sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - D. Pasal-pasal dalam hukum dasar harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang lain
3. Salah satu contoh pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 31 ayat (1) terdapat pada pernyataan
 - A. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 2002
 - B. Meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, Fatmala tetap melanjutkan sekolah dengan beasiswa dari pemerintah
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat membahas rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara bersama presiden pada akhir tahun 2016
 - D. Negara menyelenggarakan pekan kebudayaan nasional untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan nasional.
4. Perhatikan pernyataan berikut!
 - 1) Pemerintah kabupaten menyediakan sarana fasilitas kesehatan gratis
 - 2) Pemerintah menyalurkan kredit usaha kecil menengah melalui bank
 - 3) Sekolah-sekolah di daerah mendapatkan dana bantuan operasional sekolah
 - 4) Pemerintah menggalakkan program produksi padat karya
 - 5) Besaran tunjangan bantuan langsung tunai bagi warga miskin ditingkatkan 20%

Upaya pemerintah yang terlihat dalam rangka memberikan kesejahteraan dalam bidangekonomi terdapat pada angka

- A. (1) dan (4)
- B. (1) dan (5)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

5. Perhatikan pernyataan berikut!

- 1) Mematuhi hukum positif Indonesia
- 2) Membayar pajak tepat waktu
- 3) Menjaga sarana umum

Dari pernyataan di atas yang merupakan wujud penegakan konstitusi di lingkungan

- A. Masyarakat
- B. Keluarga
- C. Sekolah
- D. Negara

Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 2 ini, silahkan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 3. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai} : \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

1. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (*disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan*), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catatkan pada buku catatan Ananda bagian mana saja yang masih belum Ananda pahami untuk kemudian Ananda dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. Jika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75, Ananda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya atau mengikuti Tes Akhir Modul.
3. Setelah Ananda lulus dalam mengikuti Tes Akhir Modul, Ananda dapat mempelajari materi pembelajaran yang terdapat dalam modul berikutnya.
4. Lakukan langkah **1** sampai dengan **3** di atas merupakan persyaratan Ananda untuk dapat mempelajari modul berikutnya.

TES AKHIR MODUL



Untuk lebih memperkuat lagi pemahaman Ananda dalam modul 3 ini, silakan Ananda mengerjakan tes akhir modul dengan baik.

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat pada soal di bawah ini!

1. Konsekuensi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara bagi peraturan perundang-undangan lain adalah
 - A. Peraturan perundangan-undangan lain di bawah konstitusi berkedudukan sebagai aturan pelaksana
 - B. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan lainnya
 - C. Ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya jika bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar akan batal demi hukum
 - D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hukum tertinggi dalam hierarki perundangan-undangan di Indonesia
2. Segala peraturan perundangan-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diterbitkan peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa
 - A. Tata hukum Indonesia mengikat seluruh penduduk Indonesia
 - B. Tata hukum Indonesia merupakan lanjutan dari tata hukum kolonial
 - C. Indonesia mulai menerapkan tata hukum Indonesia sesuai Pancasila
 - D. Peraturan zaman kolonial yang tidak bertentangan dengan Pancasila tetap berlaku
3. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara yang menguji adalah
 - A. MPR
 - B. DPR
 - C. MK
 - D. MA
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yaitu pasal 28A-28J. Akan tetapi di Indonesia masih dibentuk berbagai peraturan tentang hak asasi manusia. Alasan dibentuknya peraturan pendamping hak asasi manusia adalah
 - A. Ketentuan pasal 28A-28J tidak memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat dan berlaku bagi semuanya
 - B. Ketentuan pasal 28A-28J masih bersifat universal sehingga belum dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat
 - C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan dasar negara tetapi hukum dasar tertinggi
 - D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan undang-undang negara sebagai aturan operasional

5. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut,
- (2) Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya,
- (3) Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya,
- (4) Adanya keinginan warga negara untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik yang ada di wilayahnya dan tetangga sekitarnya

Pernyataan menurut pendapat Bryce hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar adalah

- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)
 - C. (1), (3), dan (4)
 - D. (2), (3), dan (4)
6. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan artinya
- A. politik kenegaraan membuat aturan untuk setiap Lembaga Negara dan wajib untuk mematuhi
 - B. sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - C. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan
 - D. Lembaga negara memegang teguh hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi (kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan). Contoh hukum dasar tidak tertulis adalah
- A. peraturan daerah tentang lalu lintas dan jalan raya yang berbeda dalam setiap Provinsi
 - B. perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat Indonesia
 - C. pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR
 - D. regulasi dari pemerintah Indonesia yang mengatur ketatanegaraan Indonesia
8. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai
- A. pemersatu bangsa Indonesia
 - B. teladan bagi semua warga negara
 - C. alat pengukur dan pengecek
 - D. alat kontrol, dan mengecek

9. Perhatikan pernyataan berikut

- (1) Pembukaan
- (2) 3 pasal aturan peralihan
- (3) 21 bab dalam batang tubuh
- (4) 2 pasal aturan tambahan
- (5) 73 pasal dalam batang tubuh

Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari

- A. (1), (2), (3), (4), dan (5)
- B. (1), (2), (4), (5), dan (5)
- C. (1), (3), (5), (2), dan (4)
- D. (1), (4), (5), (3), dan (2)

10. Konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) dapat ditinjau dari sudut pandang yaitu

- A. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar
Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD sulit atau memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang mudah, UUD tersebut dapat dikatakan *rigid*.
- B. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar
Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan *rigid*.
- C. Sulit mengikuti perkembangan zaman
Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan *rigid* apabila dapat mengikuti perkembangan zaman.
- D. Mudah mengikuti perkembangan zaman
Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan *luwes* apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.

- ii. Jawablah dengan menjawab betul atau salah dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang Anda anggap betul

No.	Pertanyaan	B	S
1	Negara Republik Indonesia mempunyai konstitusi yang ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia		
2	Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.		
3	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.		
4	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang terpisah, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya dapat dipisahkan.		
5	Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 30 bab. Sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari atas 70 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari atas 5 pasal Aturan Peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal Aturan.		

LAMPIRAN



GLOSARIUM

dasar negara	: ajaran yang merupakan gagasan pikiran tentang kehidupan dunia serta kehidupan bernegara menjadi pedoman dasar dalam mengatur, memelihara, serta mengembangkan kehidupan bernegara
hukum dasar tertulis	: hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi.
kompetensi	: kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan
luwes	: dinamis, mudah menyesuaikan
peraturan	: kegiatan membangun norma masyarakat sebagai pedoman supaya manusia hidup tertib dan teratur.
proklamasi	: pernyataan resmi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajah, sehingga Indonesia bebas dan berdaulat
rigid	: kaku
universal	: umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia); bersifat (melingkupi) seluruh dunia



Kunci Jawaban Tugas

Kegiatan Belajar 1

1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya.
2. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - Alat kontrol
Bisa menjadi alat untuk mengecek atau menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi RI atau malah bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.
 - Fungsi pengatur
Berperan mengatur kekuasaan negara, meliputi bagaimana cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan. Karena itu, dalam melaksanakan kekuasaannya, seluruh lembaga negara, termasuk presiden
 - Penentu
Penentu atas hak dan kewajiban negara, aparat pemerintah, dan warga negara.

Kegiatan Belajar 2

Lingkungan

1. Keluarga
Penerapannya adalah saling menghormati dengan anggota keluarga, mematuhi aturan rumah, dan menjaga nama baik keluarga
2. Sekolah
Penerapannya menaati peraturan sekolah, menghormati guru, dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu
3. Masyarakat
Menghormati orang yang lebih tua, selalu aktif dalam kegiatan di masyarakat, dan menghargai pendapat orang lain
4. Bangsa dan negara
Menghargai hak dan kewajiban orang lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan membayar pajak tepat waktu



Kunci Jawaban Tes Formatif

Kegiatan Belajar 1

No.	Jawaban	Skor
1	A. Luas	1
2	B. Lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan dalam undang-undang dasar	1
3	C. Konstitusi merupakan bentuk pengaturan tentang berbagai aspek mendasar dalam sebuah negara	1
4	D. Tidak tertulis	1
5	C. Suatu tatanan nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat	1
	Jumlah	5

Pedoman penskoran dan penilaian:
Jika jawaban benar nilainya adalah 1,
sedangkan jika salah nilainya 0

Jumlah skor yang betul
Nilai: $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah skor seluruhnya}} \times 100\%$

Kegiatan Belajar 2

No.	Jawaban	Skor
1	A. Majelis Permusyawaratan Rakyat	1
2	B. Semua peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1
3	B. Meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, Fatmala tetap melanjutkan sekolah dengan beasiswa dari pemerintah	1
4	D. (2) dan (4)	1
5	D. negara	1
	Jumlah	5

Pedoman penskoran dan penilaian:
Jika jawaban benar nilainya adalah 1,
sedangkan jika salah nilainya 0

Jumlah skor yang betul
 Nilai: $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah skor seluruhnya}} \times 100\%$



Kunci Jawaban Tes Akhir Modul

Kunci Jawaban Tes Akhir Modul (TAM) Pilihan Ganda

No.	Jawaban	Skor
1	D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hukum tertinggi dalam hierarki perundangan-undangan di Indonesia	1
2	D. Peraturan zaman kolonial yang tidak bertentangan dengan Pancasila tetap berlaku	1
3	A. MK	1
4	D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan undang-undang negara sebagai aturan operasional	1
5	A. A. (1), (2), dan (3)	1
6	A. politik kenegaraan membuat aturan untuk setiap Lembaga Negara dan wajib untuk mematuhi	1
7	C. pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR	1
8	D. alat kontrol, dan mengecek	1
9	C. (1), (3), (5), (2), dan (4)	1
10	B. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan <i>rigid</i>	1

Pilihan betul salah

No.	Pernyataan	jawaban	skor
1	<p>Negara Republik Indonesia mempunyai konstitusi yang ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia</p> <p>Seharusnya Negara Republik Indonesia mempunyai konstitusi yang ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia</p>	S	1
2	<p>Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	B	1
3	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.</p>	B	1
4	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang terpisah, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya dapat dipisahkan.</p> <p>Seharusnya Tidak dapat dipisahkan</p>	S	1
5	<p>Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 30 bab. Sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari atas 70 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari atas 5 pasal Aturan Peralihan, setelah diubah menjadi • 3 pasal Aturan Peralihan.</p> <p>Seharusnya Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari atas 70 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat.</p>	S	1
	<p>Sebelum diubah terdiri dari atas 5 pasal Aturan Peralihan, setelah diubah menjadi • 2 pasal Aturan Peralihan.</p>		

DAFTAR PUSTAKA

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI
- Rohayani Ida dan Saputra Surya Lukman, 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Buku Guru kelas VIII*, Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Rohayani Ida dan Saputra Surya Lukman, 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Buku Siswa kelas VIII*, Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995. *Risalah Siang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemennya*, Jakarta: Tim Grasindo
- Tentang alur penyusunan ruu diakses pada 13 Agustus 2021 pada <https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu>
- Sejarah undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diakses pada 13 Agustus 2021 pada <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/>
- PUSKON diakses tanggal 13 Agustus 2021 pada <https://www.mkri.id/public/content/puskon/guide%20book%20PUSKON.pdf>
- Sejarah konstitusi di Indonesia diakses tanggal 13 Agustus 2021 pada <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2015/03/sejarah-konstitusi-di-Indonesia.pdf>

Diterbitkan oleh:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama